

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH SATUAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT DAN PUSAT PENGENDALI OPERASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI

Zulkifli Arifin¹ & Salam²

¹Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: iccunkriffin@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: salmanimm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanggulangan bencana banjir oleh Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai. Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian tentang efektivitas penanggulangan bencana banjir oleh Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sudah berjalan efektif. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai yaitu TRC melakukan penanganan dan penanggulangan bencana alam, sementara PUSDALOPS menyediakan layanan informasi kebencanaan. Kejelasan strategi pencapaian tujuan dilakukan mengacu pada standar operasional prosedur. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap sebelum melaksanakan penanggulangan bencana banjir, Satgas TRC dan PUSDALOPS Sinjai melakukan analisis kejadian banjir dilapangan. Perencanaan yang matang Satgas TRC yaitu melakukan posko, kaji cepat kejadian bencana, evakuasi, melakukan tanggap darurat. Penyusunan program yang tepat yaitu menyusun dokumen penanggulangan bencana banjir, kontinjensi bencana banjir, standar prosedur penanggulangan bencana.

Kata kunci: TRC; PUSDALOPS

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia. Ketika terjadinya suatu bencana maka kita berhadapan dengan masalah yang berhubungan dengan manusia, sehingga kondisi serta kebutuhan manusia yang menjadi para korban bencana harus didahulukan mengingat bencana alam tersebut berdampak pada rasa aman, tenteram, makmur, yang merupakan syarat akan terpinhinya kesejahteraan seseorang. Misalnya hujan deras dan lama serta kondisi daerah pengaliran sungai yang tidak mampu menahan air hujan, akan menimbulkan aliran permukaan yang besar. Bila palung atau cekungan sungai tidak mampu lagi menampung aliran permukaan yang besar, terjadilah banjir.

Kabupaten Sinjai terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan terdiri dari daerah pegunungan dan laut yang memiliki resiko bencana atau rawan bencana. Namun, pada umumnya pemanfaatan lahan di

Kecamatan Sinjai Utara sebagian besar merupakan lahan pemukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi, hal ini disebabkan karena Kecamatan Sinjai Utara merupakan ibu kota dari Kabupaten Sinjai.

Pada Januari 2021 Intensitas curah hujan yang mulai meningkat sejak beberapa hari terakhir ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya bencana. Hal ini perlu adanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam penanggulangan banjir.

KAJIAN TEORI

Efektivitas

Menurut Noorhani (dalam Isna Chusniatun, 2022) efektivitas merupakan suatu usaha atau tindakan yang berhasil guna yang dilakukan dengan memanfaatkan waktu dan cara sebaik baiknya untuk pencapaian tujuan atau sasaran-sasarannya melalui prestasi orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi sehingga memberikan hasil yang memuaskan. Disebutkan oleh Isna Chusniatun (2022) efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai.

Menurut Siagian (dalam Evan Sarli, 2018), mengemukakan bahwa ukuran untuk mengetahui efektivitas suatu organisasi mencakup tentang:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, adanya tujuan yang jelas dan pasti yang telah ditetapkan dalam mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, lembaga atau badan pemerintahan diharapkan memiliki strategi yang tepat dan jelas dalam melaksanakan pemerintahan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, pemerintah diharapkan mampu melakukan proses analisis yang tepat dalam melihat kondisi di masyarakat sehingga mampu merumuskan kebijakan yang matang dan sesuai dengan kondisi masyarakat;
4. Perencanaan yang matang, perlu dibuat perencanaan yang benar-benar matang sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat dan tidak merugikan kedua pihak, baik itu pihak masyarakat maupun pemerintah itu sendiri;
5. Penyusunan program yang tepat, setelah adanya proses analisis yang tepat dan baik maka akan dibuatlah penyusunan program yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan melalui proses perencanaan yang tepat maka akan menghasilkan menghasilkan penyusunan penyusunan program program yang tepat sesuai dengan kebutuhan kebutuhan masyarakatnya masyarakatnya sehingga pemerintah pemerintah diharapkan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakatnya;

Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana atau manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang bertujuan untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. Hal yang sama juga dijelaskan oleh UNISDR (dikutip dalam Ginting, 2018: 26) bahwa manajemen bencana atau manajemen resiko bencana adalah suatu proses yang sistematis dalam menggunakan peraturan administratif, lembaga dan keterampilan serta kapasitas bertahan yang jauh lebih baik untuk mengurangi dampak yang bisa merugikan dari ancaman bahaya serta kemungkinan bencana.

Bencana merupakan kejadian atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan serta penghidupan warga yang penyebabnya bersumber dari alam dan juga dari non alam serta dari manusia sehingga berdampak terjadinya korban jiwa manusia, terjadinya kerusakan lingkungan, berdampaknya pada kerugian harga benda dan berdampak psikologis bagi individu yang terkena. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa yang dimaksud bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ada 3 (tiga) kategori jenis bencana, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat. Mitigasi bencana ini ada dua, yaitu struktural dan non-struktural (BNPB, 2008:17).

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa Pasal 20 Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahapan meliputi:

1. Pra bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi: a. dalam situasi tidak terjadi bencana, b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
2. Saat tanggap darurat, Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi : a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; b. penentuan status keadaan darurat; c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. pemenuhan kebutuhan dasar; e. perlindungan dan penanganan terhadap

kelompok anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus, dan lanjut usia; dan f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

3. Pasca bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi : a. rehabilitasi; dan b. rekonstruksi. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan para tokoh masyarakat dan/atau pemuka agama di wilayah setempat.

Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

1. Tugas Pokok TRC dan Pusdalops

TRC mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB), disebutkan bahwa Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum bencana: memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin.
- b. Saat bencana: memberi dukungan di Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat.
- c. Pasca bencana: memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

2. Fungsi TRC dan Pusdalops

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, pada saat tanggap darurat.
- b. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk:
 - 1) Mengaktivasi pos SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
 - 2) Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
 - 3) Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota :
 - 1) Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.

2) Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/ khusus).

3) Laporan lengkap/akhir penugasan (bpbd.sinjaikab.go.id., 2021).

Sementara fungsi Pusdalops PB dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB), sebagai berikut:

- a. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.
- b. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
- c. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif
- d. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Menurut Solway (dalam Sri Heryati, 2020), tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten; 2) Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam; 3) Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana; 4) Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan/sistem pengendalian massa dan kebakaran; 5) Memastikan anggota masyarakat menerima pelatihan *first aid*/pertolongan pertama yang sesuai; 6) Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat; dan 7) 1. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama dan gubernur berfungsi memberikan dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana penanggulangan bencana; memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah; melindungi masyarakat dari ancaman bencana; melaksanakan tanggap darurat; serta melakukan pemulihan pasca bencana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penanggulangan Bencana Banjir oleh Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Dari hasil observasi mengenai bencana banjir di Kabupaten Sinjai dapat penulis tampilkan data mulai tahun 2018 sampai tahun 2022. Rinciannya dapat penulis tampilkan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Bencana Banjir Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Kejadian Banjir	Keterangan
1.	2019	13	Dokumen rincian lokasi banjir terlampir pada lampiran 7 halaman 11
2.	2020	2	Dokumen rincian lokasi banjir terlampir pada lampiran 8 halaman 12
3.	2021	4	Dokumen rincian lokasi banjir terlampir pada lampiran 9 halaman 13
4.	2022	6	Dokumen rincian lokasi banjir terlampir pada lampiran 10 halaman 15

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

Tabel di atas menunjukkan data bencana banjir Kabupaten Sinjai mulai tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019 terdapat 13 kejadian banjir, tahun 2020 terdapat 2 kejadian banjir, di tahun 2021 terjadi 4 bencana banjir, dan di tahun tahun 2022 terjadi 6 kali banjir.

Dibentuknya satuan tugas tim reaksi cepat di Kabupaten Sinjai mempunyai tujuan khusus yaitu untuk melakukan penanganan dan penanggulangan bencana alam seperti banjir, longsor, abrasi, angin kencang dan lainnya. Seperti halnya dibentuknya PUSDALOPS yaitu untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi tentang kebencanaan baik pra bencana saat bencana terlebih pasca bencana. Upaya agar tujuan dibentuknya Satgas TRC dan Pusdalops Sinjai dapat tercapai secara maksimal yaitu memfasilitasi pelaksanaan fungsi dan peran satgas TRC dan Pusdalops, dan meningkatkan kapasitas Satgas baik pada saat pra bencana, tanggap bencana, maupun pemulihan bencana.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi Satgas Pusdalops Sinjai dalam melaksanakan penanggulangan bencana yaitu mendorong personil TRC untuk belajar secara mandiri juga memahami tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kegiatan status siaga bencana dengan kegiatan pemantauan dan analisis data dan informasi kejadian bencana dari berbagai sumber, melaksanakan kaji cepat, menganalisa laporan hasil kaji cepat dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BPBD. menyusun Rencana Operasi dan mengelola sumber daya dan menyebarluaskan informasi bencana kepada masyarakat dan instansi lembaga terkait, dengan output Laporan kejadian bencana disertai rekomendasi pelaksanaan kaji cepat.

Dari hasil observasi mengenai Kegiatan dan Output Penetapan Status Tanggap Darurat TRC dan Pusdalops Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Kegiatan dan Output Penetapan Status Tanggap Darurat
TRC dan Pusdalops Kabupaten Sinjai**

No.	Kegiatan	Output
1.	Melakukan pemantauan dan analisis data dan informasi kejadian bencana dari berbagai sumber	Laporan kejadian bencana disertai rekomendasi pelaksanaan kaji cepat

2.	Menugaskan TRC untuk melaksanakan kaji cepat	SPT TRC untuk melaksanakan kaji cepat
3.	Melaporkan hasil kaji cepat kepada Kalaksa BPBD untuk dijadikan bahan pertimbangan	Laporan TRC
4.	Menganalisa laporan hasil kaji cepat dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BPBD.	Laporan hasil analisa dan Rekomendasi pelaksanaan Rakor dengan lembaga/instansi terkait
5.	Mengundang dan melaksanakan rapat koordinasi dengan FORKOPIMDA dan lembaga/instansi terkait untuk melaksanakan rapat koordinasi	Rekomendasi penetapan status
6.	Mempersiapkan naskah surat pernyataan untuk penetapan status tanggap darurat	Naskah surat pernyataan Status Tanggap Darurat oleh Bupati yang telah teregistrasi
7.	Menetapkan Status Tanggap Darurat dan menunjuk Komandan PDB	Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat
8.	Menerbitkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Pos Komando PDB	Naskah keputusan Bupati yang telah ditandatangani
9.	Mengaktivasi Pusdalops menjadi Pos Komando PDB, Membentuk Pos Lapangan (Poslap) di lokasi bencana, menyusun rencana operasi dan mengelola sumber daya dan menyebarluaskan informasi bencana kepada masyarakat dan instansi lembaga terkait	Sistem Komando PDB berjalan

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Siklus mekanisme penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Sinjai, untuk lebih jelasnya dapat penulis tampilkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Siklus Mekanisme Penyelenggaraan Penanganan Bencana

Gambar di atas menunjukkan siklus mekanisme penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Sinjai yang pertama kesiapsiagaan terdiri dari peringatan dini dan rencana siaga, yang kedua kajian darurat terdiri dari rencana operasional dan kajian darurat, yang ketiga pemulihan terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi, dan yang keempat mitigasi dan pencegahan. Satgas TRC dan Pusdalops Sinjai melakukan analisis kejadian banjir dilapangan diantaranya melakukan pemetaan kawasan rawan banjir dengan klasifikasi kejadian tinggi dan rendah, menentukan jalur evakuasi masing-masing daerah yang dianggap rawan banjir, melakukan atau melaksanakan proses

evakuasi, memfasilitasi ataupun menyiapkan kebutuhan dasar (bantuan logistik), melaksanakan penanggulangan korban banjir dengan prioritas kelompok rentan seperti orang tua, ibu hamil, balita, dan penyandang disabilitas.

4. Perencanaan yang Matang

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat alur penangan bencana yang dilakukan Satgas TRC dan PUSDALOPS BPBD Sinjai, adapun standar operasional prosedurnya yaitu:



Gambar 2. Alur Penangan Bencana Satgas TRC dan PUSDALOPS BPBD Sinjai

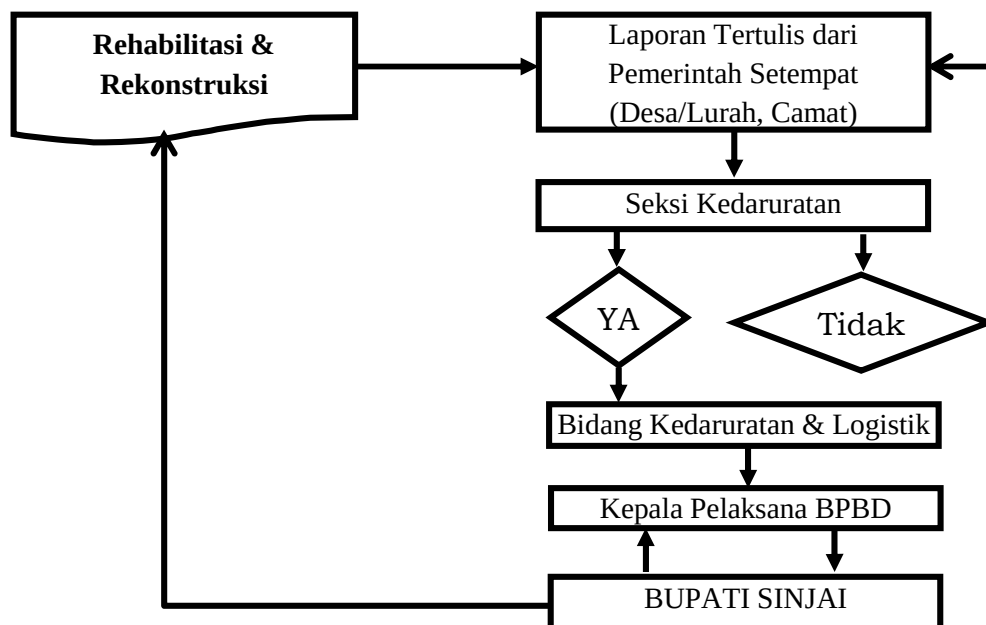
Gambar di atas menunjukkan Alur Penangan Bencana Satgas TRC dan PUSDALOPS BPBD Sinjai yang diawali dari laporan bencana yang datanganya melalui laporan masyarakat lewat SMS, telepon, surat, dan laporan langsung. Laporan tersebut dilaporkan di posko siaga bencana dengan sumber informasi jelas, lokasi kejadian, data sementara, dan tingkat kerusakan. Laporan yang diterima posko siaga bencana selanjutnya diteruskan ke Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan berkoordinasi dengan SAR, Unit Emergency, PMI, dan Tim Lositik. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut melalui kegiatan evakuasi, penanganan korban, penanganan pengungsi, dan distribusi logistik. Selanjutnya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perencanaan Satgas TRC melakukan posko atau penjagaan, melakukan kaji cepat pada saat kejadian bencana, melakukan evakuasi, melakukan tanggap darurat, sementara perencanaan Satgas PUSDalops yaitu mencari informasi tentang potensi kejadian bencana, menyebarluaskan informasi prakiraan cuaca dan potensi ancaman bencana, mengeluarkan peringatan dini, membackkup kegiatan tanggap darurat yang pasti bahwa di awal perencanaannya itu mereka senantiasa melakukan upaya peningkatan kapasitas baik TRC maupun PUSDalops, disamping penyediaan

peralatan dan logistik. TRC dan Pusdalops fungsinya adalah membantu dampak pemulihan dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang terdampak, mengevakuasi korban terdampak banjir jika memang harus diungsikan atau evakuasi warga dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman.

5. Penyusunan Program yang Tepat

Penanganan bencana maka TRC dan PUSDALOPS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Standar operasional prosedurnya dapat gambarkan sesuai alur sebagai berikut:



Gambar 3. Alur penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

Gambar di atas menunjukkan Alur penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan laporan tertulis dari pemerintah setempat baik itu desa, lurah, dan camat, selanjutnya laporan tersebut di bawa ke bagian seksi kedaruratan untuk mendapatkan tindak lanjutnya, apabila disetujui maka diterukan ke bidang kedaruratan dan logistik, selanjutnya di lakukan persetujuan oleh kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas persetujuan bupati, selanjutnya dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi

Program-program yang telah dibuat apabila terjadi bencana banjir di Kab. Sinjai yaitu menyusun dokumen penanggulangan bencana banjir, menyusun dokumen kontinjensi bencana banjir, menyusun dokumen dan standar prosedur penanggulangan bencana. sarana prasarana yang digunakan TRC dan PUSDALOPS BPBD Sinjai dalam melakukan penanganan bencana banjir yaitu mobil lapangan, alat komunikasi, alat pelampung, tenda, motor, peralatan rescue, dolfi, dapur, dan perahu karet.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas penanggulangan bencana banjir oleh Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sudah berjalan efektif, dengan indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang, dan penyusunan program yang tepat, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) yaitu untuk penanganan dan penanggulangan bencana alam, sementara tujuan dibentuknya PUSDALOPS adalah untuk menyediakan layanan informasi tentang kebencanaan baik pra bencana saat bencana terlebih pasca bencana, agar tujuan dapat tercapai secara maksimal yaitu memfasilitasi pelaksanaan fungsi dan peran satgas TRC dan Pusdalops, dan meningkatkan kapasitas Satgas pada saat pra bencana, tanggap bencana, maupun pemulihan bencana.
2. Kejelasan strategi yang dilakukan Satgas TRC dan Pusdalops Sinjai dalam menangani banjir yaitu mengacu pada standar pelayanan minimal dilengkapi standar operasional prosedur sehingga ketika terjadinya sesuatu atau dibutuhkan mereka bergerak sesuai SOP yang ada.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir, Satgas TRC dan Pusdalops Sinjai melakukan analisis kejadian banjir dilapangan diantaranya melakukan pemetaan kawasan rawan banjir dengan klasifikasi kejadian tinggi dan rendah, menentukan jalur evakuasi masing-masing daerah yang dianggap rawan banjir, melaksanakan proses evakuasi, memfasilitasi kebutuhan dasar (bantuan logistik), melaksanakan penanggulangan korban banjir dengan prioritas kelompok rentan seperti orang tua, ibu hamil, balita, dan penyandang disabilitas.
4. Perencanaan yang matang p oleh Satgas TRC melakukan posko atau penjagaan, melakukan kaji cepat pada saat kejadian bencana, melakukan evakuasi, melakukan tanggap darurat, sementara perencanaan Satgas Pusdalops yaitu mencari informasi tentang potensi kejadian bencana, menyebarluaskan informasi prakiraan cuaca dan potensi ancaman bencana, mengeluarkan peringatan dini, membackkup kegiatan tanggap darurat.
5. Penyusunan program yang dibuat apabila terjadi bencana banjir yaitu menyusun dokumen penanggulangan bencana banjir, menyusun dokumen kontinjensi bencana banjir, menyusun dokumen dan standar prosedur penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, Akhmad. (2017). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah), jurnal ketahanan nasional vol. 23, No. 2. Dipublikasikan oleh <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/26257/0>
- BNPB. (2008). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 tahun 2008. Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta: BNPB.

- Chusniatun, Isna. (2022). Efektivitas Sosialisasi Dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19, skripsi, UIN Prof. K. H. Zaifuddin Zuhri, dipublikasikan oleh <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12843/>
- Erlia, Devy. (2017). Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Dan Pemerintah Menghadapi Bencana Banjir Di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, jurnal pendidikan geografi, vol 4, no. 3, dipublikasikan <https://ppjp.ulm.ac.id/jurnal/index.php/jpg/article/view/3525>
- Ferianto, Kusno. (2019). Efektifitas Pelatihan Penanggulangan Bencana Dengan Metode Simulasi Terhadap Perilaku Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada Siswa Sman 2 Tuban, jurnal kesehatan, vol 5, no 2. Dipublikasikan <https://ejournal.stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id/index.php/mesencephalon/article/view/110>
- Ginting (2018). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung, skripsi Medan: USU, dipublikasikan <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7969>
- Heryati, Sri. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 2, No. 2, dipublikasikan oleh <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/1088>
- Mughron, Mufis. (2015). Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana di Kota Semarang, jurnal kebijakan public dan manajemen, vol 5, no 1, dipublikasikan oleh <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10317>
- Muhamad, Tachya. (2017). Modal Sosial dalam Penanggulangan Bencana Banjir (Kasus di Kabupaten Bandung, Jawa Barat), jurnal sosiologi, vol 1, no. 2. dipublikasikan <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiloglobal/article/view/13306>
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)
- Pemerintah Kabupaten Sinjai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2021). TRC Satuan Tugas Tanggap Bencana, diakses melalui <https://bpbd.sinjaikab.go.id/halaman/detail/trc-satuan-tugas-tanggap-bencana>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana
- Sabilla, Alifa Asta. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir di Kabupaten Gresik, jurnal Syntax, vol 2. No. 5, dipublikasikan <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/252>
- SSudamara, Yoktan (2012) Optimasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Manado dengan Metode Ahp (Analytical Hierarchy Process), Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 2, No. 4, dipublikasikan oleh <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/4247>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta
- Ulum, Mochammad Chazienul. (2013). Governance dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir di Indonesia, jurnal penanggulangan bencana dialog, ISSN 2087-636x, dipublikasikan oleh <https://perpustakaan.bnpb.go.id/jurnal/index.php/JDPB/article/view/66>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Wahyuni, Ftiria. (2020). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, skripsi, dipublikasikan oleh <https://123dok.com/document/yr3l3rw7-skripsi-efektivitas-kebijakan-penanggulangan-penanggulangan-kecamatan-lilirilau-kabupaten.html>
- Yayasan IDEP. (2007). Buku Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Bali
- Yuniarti, Tatik. (2018). Kepemimpinan Dan Pengelolaan Modal Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Banjir, Jurnal Makna Volume 3, No. 1, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/makna/article/view/844>